Jurnal Aktor
Vol. 2, No. 2, Februari 2023
p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167

Pelaksanaan Tugas Kelegislasian Anggota DPRD di Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019

Implementation of Legislative Duties of DPRD Members in Bulukumba Regency for the 2014-2019 period

Andi Cipta Diary Herzu[1], Muhammad Guntur[2]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
e-mail: andicipta1@gmail.com[1]

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019 dengan menggunakan teori Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kelegislasian berjalan cukup baik atau efektif. Pelaksanaan kebijakan di kantor DPRD Kabupaten Bulukumba mencapai tujuan dan sasaran kebijakan dengan kelancaran rutinitas dan tidak ada masalah. Komunikasi yang baik dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya finansial yang mencukupi, dan pengelolaan sumber daya waktu yang baik menjadi faktor penting dalam keefektifan implementasi kebijakan. Disposisi implementor yang melibatkan komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis juga berperan dalam melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi dengan SOP yang mengatur aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijaksanaan mendukung pelaksanaan tugas kelegislasian yang efektif. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019 dapat disimpulkan berjalan cukup baik.

Kata Kunci: Implementasi; Legislasi; DPRD

ABSTRACT

This research discusses the implementation of legislative tasks by members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Bulukumba Regency for the period 2014-2019, using Edward III's theory that includes the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of legislative tasks has been relatively good or effective. The policy implementation at the Bulukumba Regency DPRD has

achieved its objectives and targets with smooth routines and no major issues. Effective communication characterized by transmission, clarity, and consistency supports the successful implementation of policies. Competent human resources, sufficient financial resources, and effective resource management, including time, are vital factors in the effectiveness of policy implementation. The disposition of implementers, involving commitment, honesty, and democratic values, also plays a significant role in policy execution. The bureaucratic structure, including Standard Operating Procedures (SOPs) governing workflow and policy implementation, facilitates effective legislative tasks. Overall, it can be concluded that the implementation of legislative tasks by members of the Bulukumba Regency DPRD for the period 2014-2019 has been relatively successful.

Keywords: Implementation; Legislation; DPRD

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Maulana et al., 2019; Rengifurwarin et al., 2018). Dalam sistem perwakilan ini, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui pemilihan umum untuk menentukan wakil-wakil yang akan menyampaikan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Di tingkat daerah, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan ini dilakukan melalui wakil-wakil mereka di DPRD (Darmawan & Nurmandi, 2015; Handoyo, 2012; Meutia, 2017; Rauf, 2017; Saputro, 2016).

Otonomi daerah merupakan konsep yang dapat mendorong perkembangan daerah yang sebelumnya tertinggal akibat kebijakan yang sentralistik, di mana semua keputusan pembangunan daerah diatur langsung oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal mendasar terkait otonomi daerah, termasuk pemberdayaan masyarakat dan penumbuhan prakarsa serta kreativitas.

DPRD memiliki peran yang penting dan posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selain itu, DPRD juga berperan dalam merumuskan kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan daerah serta mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis. Dalam hal legislasi atau pembentukan Peraturan Daerah (Perda), DPRD memiliki kewenangan untuk membuat perda. Program Legislasi Daerah disusun berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, dengan prioritas pembentukan raperda. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan

fungsi legislasi DPRD masih perlu ditingkatkan, dan terdapat krisis citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang cocok untuk penelitian tentang penerapan kebijakan publik melalui fungsi legislasi. Penelitian ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian, yang kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang relevan untuk menarik kesimpulan (Creswell & Creswell, 2017).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis peristiwa yang terjadi di lapangan terkait penerapan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Periode 2014-2019. Data dikumpulkan dengan memilih dan mengumpulkan informasi yang relevan serta menentukan ruang lingkup penelitian yang spesifik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019. Dalam penelitian ini, digunakan teori Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019 dapat dikatakan cukup baik atau efektif.

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut berdasarkan wawancara dengan informan dan pengamatan:

1) Komunikasi: Pelaksanaan kebijakan di kantor DPRD Kabupaten Bulukumba dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran kebijakan cukup baik. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Komunikasi kebijakan publik ini memiliki beberapa dimensi, yaitu transmisi (penyampaian informasi kepada para pelaksana dan kelompok sasaran), kejelasan (pemahaman yang jelas tentang maksud, tujuan, dan substansi kebijakan), serta konsistensi (kesesuaian informasi kebijakan yang tetap konsisten).
2) Sumber Daya: Sumber daya manusia (kompetensi implementor) dan sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam keefektifan implementasi kebijakan. Selain itu, sumber daya waktu juga perlu diperhatikan. Ketika sumber daya manusia yang kompeten tersedia tetapi anggaran tidak mencukupi atau waktu yang terbatas, hal ini dapat menyulitkan implementasi kebijakan.
3) Disposisi: Disposisi mencakup watak dan karakteristik implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi ini menjadi dorongan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh

agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

4) Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi meliputi SOP (Standard Operating Procedures) yang mengatur aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Dalam SOP, perlu dihindari adanya fragmentasi yang sering terjadi dalam organisasi. Hal ini dapat diatasi melalui mekanisme koordinasi.

Dalam keseluruhan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019 telah berjalan cukup baik.

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019 dapat dikatakan cukup baik atau efektif. Berdasarkan teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, dalam hal komunikasi, implementasi kebijakan di kantor DPRD Kabupaten Bulukumba dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan berjalan dengan baik. Transmisi informasi kepada para pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan, kejelasan dalam pemahaman maksud dan tujuan kebijakan, serta konsistensi informasi kebijakan merupakan aspek penting yang terpenuhi (Farida et al., 2015; Limpo et al., 2015; Simshauser, 2023).

Selanjutnya, sumber daya juga memiliki peran krusial dalam keefektifan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai dan sumber daya finansial yang mencukupi sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, pengelolaan sumber daya waktu juga perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan berjalan dengan lancar (Autin et al., 2020; Eriksson et al., 2019; Greubel et al., 2021).

Disposisi para pelaku kebijakan juga memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan tugas kelegislasian. Komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis merupakan beberapa karakteristik disposisi yang penting dalam menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Dorongan yang kuat dan motivasi untuk mencapai tujuan kebijakan menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Terakhir, struktur birokrasi yang baik dengan adanya SOP yang mengatur aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijaksanaan sangat mendukung implementasi kebijakan. Hindari adanya fragmentasi yang sering terjadi dalam organisasi dan pastikan terdapat mekanisme koordinasi yang baik untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019 dengan menggunakan teori Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kelegislasian tersebut berjalan cukup baik atau efektif. Pelaksanaan kebijakan di kantor DPRD Kabupaten Bulukumba dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan menunjukkan kelancaran

rutinitas dan tidak adanya masalah, didukung oleh komunikasi yang baik dengan dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor penting dalam keefektifan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya finansial yang mencukupi, dan pengelolaan sumber daya waktu yang baik. Disposisi implementor yang melibatkan komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis juga menjadi faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi yang terdiri dari SOP yang mengatur aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijaksanaan juga mendukung pelaksanaan tugas kelegislasian yang efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kelegislasian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba periode 2014-2019 telah berjalan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

Autin, K. L., Blustein, D. L., Ali, S. R., & Garriott, P. O. (2020). Career development impacts of COVID-19: Practice and policy recommendations. *Journal of Career Development*, *47*(5), 487–494.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

Darmawan, E., & Nurmandi, A. (2015). Agenda Setting dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, *2*(3). https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0042

Eriksson, K., Ernkvist, M., Laurell, C., Moodysson, J., Nykvist, R., & Sandström, C. (2019). A revised perspective on innovation policy for renewal of mature economies – Historical evidence from finance and telecommunications in Sweden 1980–1990. *Technological Forecasting and Social Change*, *147*, 152–162. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.07.001

Farida, U., Akib, H., & Jasruddin. (2015). Policy implementation of the national program for community empowerment in rural areas healthy and intelligent generation in Mamuju regency of West Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Economic Research*, *12*(5), 2017–2025.

Greubel, C., Moors, E. H. M., & Peine, A. (2021). From Mattering to Mattering More: ‘Goods’ and ‘Bads’ in Ageing and Innovation Policy Discourses. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(14), 7596. https://doi.org/10.3390/ijerph18147596

Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.

Limpo, H. Y., Akib, H., & Dirawan, G. D. (2015). Policy formulation for the initiative right of people’s representative councilof South Sulawesi. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, *13*(4), 1781–1791.

Maulana, R. Y., Bafadhal, F., & Firmansyah, A. (2019). E-Government Implementation: The Concept of Innovative Transformation of Leadership and Public Officials’ Capacities in Indonesian Open Government (The Case

of Evaluating E-Government Utilization in Government Information Management in Jambi Province). *Available at SSRN 3497307*.

Meutia, I. F. (2017). *INTAN FITRI MEUTIA, Ph.D*. http://repository.lppm.unila.ac.id/24376/1/REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.pdf

Rauf, R. (2017). Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, *III*(April), 221–232.

Rengifurwarin, Z. A., Akib, H., Jasruddin, & Salam, R. (2018). Snapshot of public service quality in the center for integrated business service (CIBS), cooperative micro small and medium enterprises (CMSME), Maluku province, Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, *21*(3).

Saputro, H. E. (2016). Kualitas Pelayanan Publik. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *2*(1). https://doi.org/10.37676/professional.v2i1.163

Simshauser, P. (2023). On dividend policy and market valuations of Australia's listed electricity utilities: Regulated vs. merchant. *Economic Analysis and Policy*, *77*, 696–715. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.12.009